



PROSIDING SEMINAR & CALL FOR PAPER

ARAH KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Analisis Terhadap Sejumlah Kebijakan Kriminal
Dalam RKUHP

Editor:
Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

**“ARAH KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Analisis Terhadap Sejumlah Kebijakan Kriminal
Kontroversial Dalam RKUHP”**

Yogyakarta, 7 Desember 2019

DAFTAR ISI

Halaman Judul – i
Identitas Buku – iv
Kata Pengantar – vii
Daftar Isi – ix

BAB I : POLITIK HUKUM PENYUSUNAN RANCANGAN KUHP NASIONAL

- A. Politik Hukum Penyusunan Rancangan KUHP Nasional – 1
Prof. Barda Nawari Arief, SH.
- B. Kerdala Praktik Hukum Sebagai Akibat Perubahan Sistem Hukum Pidana (Telaah Kritis Terhadap R-KUHP) – 5
Deni Setya Bagus Yuhertum & Umi Rozah
- C. The Living Law dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Nasional – 17
Cahaya Wulandari
- D. Implikasi Pengakuan Legalitas Materiil Dalam RKUHP Terhadap Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* – 37
Syarif Nurhidayat

BAB II : KEBIJAKAN KRIMINALISASI DELIK PENGANCAMAN PADA KEKUASAAN UMUM DAN KETERTIBAN UMUM

- A. Kebijakan Kriminalisasi Delik Pengancaman Pada Kekuasaan Umum dan Ketertiban Umum –53
Dr. Muftakhir, SH., M.H.
- B. Dekolonialisasi atau Rekolonialisasi; Aspek Hak Asasi Manusia dan Dekriminalisasi Terhadap Keberadaan Pengaturan Delik Pengancaman Terhadap Kekuasaan dan Ketertiban Umum – 95
Erasmus A. T. Napitupulu, SH.

- C. Pasal Penghinaan Presiden: Reinkarnasi Regulasi Inkonstitusional – 107
Josua Satria Collins, S.H. & Maria L. Tarigan, S.H.

BAB III : KEBIJAKAN KRIMINALISASI DELIK-DELIK KESUSILAAN

- A. Perkembangan Delik Kesusilaan Dalam RKUHP dan Kontroversinya – 123
Dr. Yeni Widouaty, SH., M.Hum.
- B. Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan Dalam RKUHP – 131
M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum.
- C. Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perluasan Delik Kesusilaan dalam RKUHP – 159
Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.H. & Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H.
- D. Kebijakan Kriminalisasi Delik Perzinahan Melalui *Living Law* Sebagai Suatu Pendekatan Menggunakan Kearifan Lokal – 171
Dr. Joice Soraya, S.H., M.Hum.

BAB IV : DISKURSUS KEBIJAKAN ADOPSI HUKUM PIDANA KHUSUS

- A. Diskursus Kebijakan Adopsi Hukum Pidana Khusus ke Dalam Kodifikasi Hukum Pidana Nasional – 183
Hanafi Amrani, SH., M.H., LL.M., Ph.D.
- B. Diskursus Kebijakan Adopsi Hukum Pidana Khusus – 197
Dr. Trisno Raharjo, SH., M.H.
- C. Konsekuensi Pidana Khusus dalam RKUHP Pada Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana – 211
Prof. Rusli Muhammad, SH., M.H.

BAB V : SISTEM PERUMUSAN SANKSI PIDANA DALAM RKUHP

- A. Merumuskan Sanksi Pidana Dalam RUU KUHP – 221
Harkristuti Harkristono
- B. Perkembangan Sanksi Pidana Pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan KUHP September 2019 – 247
Maria Ulfah, S.H., M.Hum
- C. Sanksi Tindakan sebagai *Complement Sentence* dalam RKUHP Nasional: Analisis Kritis dari Konsep *Double Track System* – 271
Efendik Kurniawan, S.H.

ISBN: 978-623-91860-4-3

